

# Model Pendidikan Berbasis Komunitas

Toni<sup>a,1\*</sup>, Ajerin Karim<sup>b,2</sup>, Yohanes Bahari<sup>c,3</sup> Warneri<sup>d,4</sup>

<sup>a,b,c,d</sup> Universitas Tanjungpura, Program Studi Magister Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Kalimantan Barat

<sup>1</sup> [f2151231018@student.untan.ac.id](mailto:f2151231018@student.untan.ac.id); <sup>2</sup> [f2151301033@student.untan.ac.id](mailto:f2151301033@student.untan.ac.id); <sup>3</sup> [yohanes.bahari@fkip.untan.ac.id](mailto:yohanes.bahari@fkip.untan.ac.id);

<sup>4</sup> [warneri@fkip.untan.ac.id](mailto:warneri@fkip.untan.ac.id)

\* [f2151231018@student.untan.ac.id](mailto:f2151231018@student.untan.ac.id)

## INFO ARTIKEL

*Sejarah Artikel:*

Diterima: 5 Oktober 2024

Direvisi: 7 Oktober 2024

Disetujui: 11 Oktober 2024

Tersedia Daring: 20 Oktober 2024

*Kata Kunci:*

*Pendidikan*

*Komunitas*

*Alternatif*

## ABSTRAK

Fenomena tingginya biaya pendidikan merupakan kenyataan yang tak dapat disangkal. Saat ini, pendidikan sering kali dianggap sebagai "barang mewah" yang hanya dapat diakses oleh kalangan berduit, sementara masyarakat miskin harus menunggu keberuntungan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Stigma yang berkembang di masyarakat menyatakan bahwa pendidikan berkualitas selalu berhubungan dengan biaya tinggi; semakin berkualitas, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Untuk menerapkan konsep pendidikan berbasis masyarakat di sebuah kampus, penting untuk memahami prinsip-prinsipnya, seperti pembebasan, keberpihakan, partisipasi, kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan, evaluasi yang berfokus pada peserta didik, dan kepercayaan diri. Pandangan ini berupaya menghilangkan anggapan bahwa membangun konsep pendidikan semacam ini harus mengabaikan kearifan lokal. Saatnya untuk memberdayakan, mengolah, dan memanfaatkan nilai-nilai lokal dalam dunia pendidikan. Pendidikan semacam ini dapat menjadi alternatif untuk memberdayakan masyarakat lokal, khususnya di SMP Negeri 5 Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.

## ABSTRACT

*Keywords:*

*Education*

*Community*

*Alternatives*

*The phenomenon of high education costs is a reality that cannot be denied. Currently, education is often considered a "luxury item" that can only be accessed by the rich, while poor people have to wait for luck to get a decent education. The stigma that has developed in society states that quality education is always associated with high costs; The higher the quality, the greater the costs that must be incurred. To implement the concept of community-based education on a campus, it is important to understand its principles, such as liberation, alignment, participation, curriculum that suits needs, evaluation that focuses on students, and self-confidence. This view seeks to eliminate the assumption that building this kind of educational concept must ignore local wisdom. It's time to empower, cultivate and utilize local values in the world of education. This kind of education can be an alternative to empower local communities, especially at SMP Negeri 5 Ledo, Bengkayang Regency, West Kalimantan Province.*

©2024, Toni, Ajerin karim, Yohanes bahari, Warneri  
This is an open access article under CC BY-SA license



## 1. Pendahuluan

Pendidikan yang selama ini berlangsung melalui proses pembelajaran ternyata belum mampu menjawab berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, salah satunya adalah tingginya biaya pendidikan yang menjadi kenyataan tak terbantahkan. Saat ini, pendidikan sering kali dianggap sebagai "barang mewah" yang hanya bisa diakses oleh kalangan berduit, sementara masyarakat miskin harus berharap untuk mendapatkan kesempatan belajar. Biaya pendidikan

yang tinggi di berbagai jenjang, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, menjadi isu utama di lembaga-lembaga pendidikan formal. Di Sekolah, misalnya, akses pendidikan sangat tergantung pada kemampuan finansial; jika kita memiliki uang, sekolah akan terbuka, tetapi sebaliknya, jika tidak, akses itu akan sulit. Dengan alasan peningkatan mutu, banyak kampus yang berlomba-lomba menaikkan biaya pendidikan dan mengeksploitasi siswa, terkadang tanpa memperhatikan kualitas pendidikan itu sendiri. Seolah-olah, mutu pendidikan identik dengan tingginya biaya sekolah; semakin berkualitas suatu program, semakin mahal biayanya. Akibatnya, banyak orang tua dari keluarga miskin tidak mampu menyekolahkan anak mereka karena terhambat biaya. Di sisi lain, proses pendidikan yang hanya menjadikan siswa dan guru sebagai pusat perhatian membuat masyarakat dan lingkungan sekitar terpinggirkan. Sekolah tampak tidak peduli terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Dalam pandangan banyak orang, dunia sekolah dianggap sebagai dunia yang “hebat”, tetapi sering kali kurang memberikan manfaat bagi komunitas sekitar.

Padahal, sekolah memiliki tanggung jawab moral untuk mengabdikan kepada masyarakat. Misalnya, penerapan teknologi tepat guna untuk mengolah limbah ternak menjadi energi biogas menunjukkan bahwa pendidikan di sekolah tidak hanya tentang mengejar “nilai” atau “Raport”, tetapi juga tentang menyelesaikan masalah nyata yang ada di lingkungan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penting bagi siswa untuk dikenalkan pada konsep pendidikan berbasis komunitas, agar mereka lebih peka terhadap lingkungan di sekitarnya. Tulisan ini diharapkan dapat menginspirasi kita semua untuk membangun sebuah paradigma mengenai “Sekolah harapan,” yang mampu mengakomodasi kepentingan siswa dari kalangan miskin dan terpinggirkan secara ekonomi, peduli terhadap masyarakat sekitar, serta memanfaatkan potensi lokal yang sesuai dengan kebutuhan komunitas setempat.

## 2. Kajian Konsep

Pendidikan berbasis masyarakat (community-based education) adalah suatu mekanisme yang memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk memperkaya pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan seumur hidup. Munculnya paradigma ini dipicu oleh gelombang modernisasi yang mendorong terciptanya demokratisasi dalam semua aspek kehidupan manusia, termasuk pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan perlu dikelola secara desentralisasi dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, Danim berpendapat bahwa konsep pendidikan berbasis masyarakat adalah salah satu solusi alternatif untuk mengatasi masalah pendidikan. Keterpurukan metode lama yang lebih sentralistik dalam pengelolaan pendidikan mendorong perubahan cara pandang menuju otonomi bagi kampus dan masyarakat untuk mengelola pendidikan, dengan memperhatikan aspirasi dan kondisi yang ada di masyarakat. Sebagai implikasi, Zubaili menyatakan bahwa pendidikan menjadi usaha kolektif yang melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya. Partisipasi dalam konteks ini melibatkan kerja sama antara warga dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, memelihara, dan mengembangkan aktivitas pendidikan. Sebagai bentuk kerjasama, masyarakat diharapkan memiliki aspirasi yang harus diakomodasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan.

Secara konseptual, pendidikan berbasis masyarakat, atau yang sering disebut sebagai community-based education, adalah model penyelenggaraan pendidikan yang berlandaskan pada prinsip “dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.” Artinya, masyarakat berperan sebagai subjek atau pelaku pendidikan, bukan sebagai objek. Dalam hal ini, masyarakat diharapkan untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam setiap program pendidikan. Pendidikan untuk masyarakat berarti melibatkan masyarakat dalam semua program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan kata lain, masyarakat perlu diberdayakan, diberikan kesempatan, dan kebebasan untuk merancang, merencanakan, membiayai, mengelola, dan mengevaluasi apa yang mereka butuhkan secara spesifik dalam

konteks masyarakat mereka sendiri. Menurut Smith, yang dikutip oleh Zubaidi, pendidikan berbasis masyarakat adalah suatu proses yang dirancang untuk memperkaya kehidupan individu dan kelompok dengan melibatkan orang-orang dalam suatu wilayah geografis atau berbagai kepentingan umum. Proses ini bertujuan untuk secara sukarela mengembangkan tempat pendidikan, tindakan, dan peluang refleksi yang sesuai dengan kebutuhan pribadi, sosial, ekonomi, dan politik mereka. Dengan demikian, inti dari pendidikan berbasis masyarakat pada dasarnya adalah program pendidikan yang dirancang dan dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk menggali potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat berperan sebagai agen perubahan yang dapat membawa perbaikan.

Di Indonesia, model pendidikan berbasis masyarakat saat ini telah diakui keberadaannya, seperti yang tertuang dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 26 ayat 1-7. Namun, undang-undang ini tidak menggunakan istilah pendidikan berbasis masyarakat, melainkan menyebutnya sebagai pendidikan nonformal. Esensi dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan oleh warga yang memerlukan layanan pendidikan sebagai pengganti, pelengkap, atau tambahan bagi pendidikan formal dalam mendukung pendidikan seumur hidup. Dalam perkembangannya, kehadiran pendidikan berbasis masyarakat di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk melengkapi materi pendidikan formal, tetapi lebih pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan karena pendidikan formal bagi sebagian orang dianggap semakin jauh dari realitas masyarakat. Pendidikan sering kali mengabaikan potensi lokal dengan kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Seharusnya, pendidikan berfungsi sebagai "alat" untuk memberdayakan masyarakat lokal. Dalam hal ini, keberadaan pendidikan formal, seperti sekolah, seharusnya dapat berfungsi sebagai pusat pembaharuan sosial dan pemberdayaan potensi lokal. Jika ini dapat direalisasikan, pendidikan di negara ini berpotensi untuk dipenuhi dengan nilai-nilai yang berarti. Prinsip pendidikan berbasis Masyarakat.

Dari uraian di atas, ada dua hal penting dari konsep Pendidikan berbasis Masyarakat, pertama perlu adanya wawancara membangun "sekolah Harapan" yang pada dasarnya merupakan bentuk perlawanan terhadap komersialisasi pendidikan yang semakin meluas di daerah ini. Selain itu, kampus ini ingin menjauh dari sistem legal-formalistik yang membelenggu masyarakat dalam proses pendidikan. Terkadang, kampus dianggap lebih fokus pada pencapaian ijazah daripada pada pengembangan dan pemberdayaan potensi mahasiswanya. Untuk menerapkan konsep pendidikan berbasis masyarakat di sebuah kampus, penting untuk memahami prinsip-prinsipnya, antara lain:

- a. Pembebasan, Konsep pendidikan berbasis masyarakat menekankan prinsip pembebasan menuju perubahan yang lebih baik. Pembebasan berarti melepaskan diri dari belenggu legal-formalistik yang membuat pendidikan tidak kritis dan kreatif. Pada dasarnya, manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan bertindak. Kebebasan dalam menentukan, memilih, dan mengembangkan potensi adalah bagian dari kodrat manusia. Mengacu pada istilah Freire, kodrat manusia yang sejati adalah menjadi pelaku atau subjek, bukan objek atau korban. Panggilan manusia sejati adalah untuk menjadi pelaku yang sadar, bertindak untuk mengatasi dunia dan realitas yang menindas. Dunia dan realitas bukanlah sesuatu yang ada begitu saja dan harus diterima sebagai takdir yang tidak dapat dihindari, melainkan harus dicerna dengan sikap kritis.

Manusia diharapkan berinteraksi dengan dunia dan realitas secara kreatif, yang mengindikasikan perlunya sikap orientatif dalam mengembangkan kemampuan berpikir. Pada dasarnya, manusia mampu memahami keberadaan diri dan lingkungan sekitarnya, dan dengan berpikir serta bertindak, ia dapat mengubah dunia. Hal ini menjadikan manusia berbeda dari binatang yang hanya bergerak berdasarkan naluri. Meskipun manusia juga memiliki naluri, mereka dilengkapi dengan kesadaran dan identitas. Ini tidak

berarti manusia bebas dari keterbatasan, tetapi dengan kodrat kemanusiaannya, mereka mampu mengatasi berbagai tantangan. seseorang harus mampu mengatasi situasi yang membatasi dirinya. Jika seseorang menyerah atau pasrah pada keadaan tersebut, terutama tanpa usaha dan kesadaran, maka ia kehilangan sisi kemanusiaannya. Individu yang manusiawi seharusnya menjadi pencipta (the creator) dari sejarahnya sendiri, karena setiap orang hidup bersama orang lain sebagai bagian dari umat manusia. Oleh karena itu, proses pendidikan yang mengabaikan potensi manusia dapat dianggap sebagai dehumanisasi, mengacu pada istilah yang digunakan Freire.

- b. Keberpihakan Prinsip ini merupakan kritik terhadap sistem pendidikan yang dibangun oleh pihak penguasa (pemerintah) yang sering kali tidak berpihak pada masyarakat miskin. Program-program pendidikan yang dirancang pemerintah sering kali kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat yang kurang beruntung. Meskipun secara politik program tersebut dihasilkan dari kepedihan masyarakat yang terabaikan, kenyataannya mereka tidak pernah mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, pendidikan di masa depan perlu lebih mengedepankan keberpihakan terhadap masyarakat miskin yang selama ini tidak mendapatkan hak mereka untuk pendidikan yang layak. Pendidikan seharusnya menjadi proses pemerdekaan yang berfokus pada realitas manusia dan secara metodologis berlandaskan pada prinsip aksi dan refleksi total, yaitu tindakan untuk mengubah kenyataan yang menindas, sekaligus secara terus-menerus menumbuhkan kesadaran tentang realitas tersebut dan dorongan untuk mengubahnya. Keberpihakan merupakan ideologi pendidikan itu sendiri, di mana keluarga miskin berhak mendapatkan ilmu pengetahuan serta pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.
- c. Keberpihakan. Prinsip ini juga mengkritik pemerintah terkait tingginya biaya pendidikan, serta "menyindir" orang tua yang lebih memilih kampus berkualitas meskipun biayanya mahal. Perlu dipahami bahwa kampus dengan biaya rendah tidak semestinya diperuntukkan khusus bagi anak-anak miskin. Dengan kata lain, sekolah harus terbuka bagi semua kalangan, terlepas dari latar belakang ekonomi, baik kaya maupun miskin (education for all).
- d. Kurikulum berbasis kebutuhan. Seharusnya, kurikulum pendidikan harus sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan masyarakat setempat. Kurikulum sebagai alat dan upaya dalam pelaksanaan pendidikan nasional merupakan kegiatan terorganisir dan terintegrasi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dengan tujuan mencapai pendidikan nasional. Namun, pada kenyataannya, kurikulum pendidikan saat ini dinilai tidak lagi berorientasi pada kebutuhan masyarakat. sekolah perlu berusaha menciptakan kurikulum yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, yang berarti kurikulum tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan dalam pengelolaan serta memperkuat sumber daya yang ada untuk menjaga kelestarian dan meningkatkan kehidupan masyarakat setempat.
- e. Kerjasama. Metodologi pendidikan yang diterapkan di sekolah-sekolah sering kali terkesan dikotomik. Hubungan antara guru dan siswa cenderung seperti hubungan antara raja dan pelayan, di mana guru bersikap otoriter dan siswa dianggap "bodoh," sehingga mahasiswa hanya menerima pengetahuan tanpa adanya interaksi yang memadai. Paradigma ini perlu diubah dengan menerapkan prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama dalam pendidikan bertujuan untuk menghapus batasan antara dosen dan mahasiswa, baik dalam ruang maupun waktu. Dalam konteks ini, guru dan siswa adalah sebuah tim yang berproses secara partisipatif.
- f. Evaluasi Berpusat pada siswa. Pelaksanaan ujian di kampus saat ini lebih menekankan aspek kognitif, yang merupakan salah satu kelemahan dalam dunia pendidikan saat ini. Selain itu, prinsip-prinsip evaluasi mencakup tiga aspek penting. Pertama, prinsip kontinuitas, di mana evaluasi dilakukan secara berkesinambungan dari awal proses belajar-mengajar hingga selesai. Kedua, prinsip komprehensif, yang mencakup berbagai

aspek untuk menunjukkan perkembangan dan perubahan perilaku mahasiswa sebagai individu yang dapat berubah seiring dengan waktu dan keadaan. Ketiga, prinsip obyektivitas, di mana evaluasi harus dilakukan seobyektif mungkin dan berdasarkan pada kenyataan yang ada.

- g. **Percaya Diri.** Pengakuan atas keberhasilan mahasiswa tidak hanya ditentukan oleh pencapaian selebar ijazah. Sebaliknya, pengakuan tersebut bergantung pada individu itu sendiri. Pengakuan akan datang secara alami ketika kapasitas dan kompetensi pribadi meningkat dan memberikan manfaat bagi orang lain. Prinsip-prinsip ini kemudian diterapkan dalam proses pendidikan berbasis masyarakat, dengan tujuan untuk menentukan posisi guru dalam mengelola pendidikan, memposisikan mahasiswa, menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan. Tiga pembelajaran dalam konteks Pendidikan berbasis pada Masyarakat. Kegiatan disekolah merupakan inti dari keseluruhan proses pendidikan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini melibatkan interaksi antara guru dan siswa. Keduanya berinteraksi dalam suatu proses yang disebut belajar-mengajar. Tentunya, untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien, maka perilaku yang terlibat dalam proses tersebut perlu didinamiskan secara baik.

### **3. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, peneliti dapat menggali bagaimana model ini diterapkan, apa saja manfaatnya, serta tantangan yang dihadapi. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan survei memberikan wawasan mendalam tentang pengalaman siswa, guru, dan anggota komunitas, sementara analisis data membantu mengidentifikasi pola dan efek dari keterlibatan komunitas dalam pendidikan. Penelitian tentang model ini bertujuan untuk memahami bagaimana keterlibatan komunitas dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa, membangun keterampilan sosial, dan memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat.

### **4. Hasil dan Pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman dan pembacaan, hasil dan pembahasan tidak dipisah dalam penulisannya. Hasil dan pembahasan harus menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Subjudul hasil dan pembahasan disajikan terpisah. Pembahasan merupakan bagian yang memiliki porsi paling banyak dalam badan artikel, minimum 60% dari keseluruhan artikel. Dalam konsep pendidikan berbasis masyarakat ada beberapa hal yang perlu digambarkan dalam proses pendidikannya, sebagai berikut. Pembahasan dapat disajikan dalam subbab dan sub-subbab sesuai dengan tujuan dan masalah secara sistematis. Untuk memudahkan pemahaman maka bagian yang harus ada dalam hasil dan pembahasan meliputi:

1. Kurikulum berbasis kebutuhan
2. Kedudukan guru
3. Siswa sebagai aktor yang bebas
4. Metode pengajaran yang menyenangkan?

Tidak dapat disangkal bahwa meskipun prinsip kurikulum yang diterapkan berbasis kebutuhan, kurikulum nasional masih tetap digunakan. Namun, keberadaan kurikulum nasional perlu dikritisi agar lebih menekankan pada kebutuhan masyarakat setempat, yaitu: 1) Memprioritaskan masalah yang dapat dipilih secara bebas; 2) Berfokus pada kegiatan belajar yang ditentukan secara kolaboratif; 3) Memberikan izin kepada setiap individu untuk memilih fokus belajar mereka sendiri; 4) Menentukan kegiatan belajar secara bersama-sama; dan 5) Memastikan setiap siswa memiliki kebebasan untuk menentukan sifat dan isi materi yang ingin mereka pelajari. Semua hal di atas merupakan upaya untuk menekankan pentingnya membangun basis pendidikan yang berorientasi pada komunitas. Oleh karena itu, kepentingan

pengetahuan perlu dikembalikan pada realitas aslinya. Pengetahuan adalah hasil abstraksi dari kenyataan, sehingga yang paling efektif untuk dipelajari adalah pengalaman langsung dalam realitas tersebut, karena dengan cara ini pengetahuan menjadi lebih berarti. Dalam konteks ini, mahasiswa diberikan kebebasan untuk mencari dan mengidentifikasi apa yang ada serta apa yang dibutuhkan di masyarakat mereka, sambil tetap menekankan bagaimana mereka sebagai anggota masyarakat dapat memecahkan masalah yang dihadapi (Hardiyanti, 2018). Selain itu, beberapa kurikulum juga dikembangkan secara optimal, seperti bahasa Inggris dan Arab, yang disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan lingkungan mereka.

Menurut Freire, seperti yang dikutip oleh Fakhri, pendidikan memiliki tiga elemen fundamental: pendidik/fasilitator, mahasiswa, dan realitas dunia. Dalam proses pendidikan, hubungan antara pendidik dan mahasiswa mirip dengan kerja sama antara "mitra" yang saling melengkapi. Artinya, keduanya memiliki kedudukan yang setara, sehingga pendidik tidak berperan sebagai "raja" yang memerintah secara otoriter kepada siswa. Sebaliknya, hubungan yang terjalin antara pendidik dan mahasiswa harus bersifat harmonis, komplementer, dan berbagi, tanpa didasari oleh struktur formal yang cenderung menghasilkan "pendidikan gaya bank" (konsep pendidikan bank). Teori Freire ini menempatkan mahasiswa sebagai "bejana kosong" yang diharapkan dapat diisi dengan ilmu pengetahuan, sehingga di kemudian hari dapat menghasilkan manfaat yang berlipat ganda. Dalam konteks ini, siswa menjadi objek investasi dan sumber potensi, di mana dosen berperan sebagai investor yang memberikan ilmu pengetahuan sebagai "deposit." siswa diperlakukan sebagai "bejana kosong" yang akan diisi, berfungsi sebagai tabungan atau investasi ilmu pengetahuan yang hasilnya akan dipanen di masa depan.

Dengan demikian, guru menjadi subjek aktif, sedangkan siswa menjadi objek pasif yang mengikuti arahan. Pendidikan pun berisiko menjadi negatif, di mana guru hanya memberikan informasi tanpa melibatkan kesadaran siswa. yang harus diterima oleh mahasiswa, serta diingat dan dihafalkan. Secara sederhana, Freire menyusun daftar kontras pendidikan "gaya bank" sebagai berikut: (1) Guru mengajar, siswa belajar; (2) Guru mengetahui segalanya, siswa tidak tahu apa-apa; (3) Guru berpikir, siswa hanya dianggap; (4) Guru berbicara, siswa mendengarkan; (5) Guru mengatur, siswa pasif; (6) Guru memilih dan memaksakan pilihannya, siswa mengikuti; (7) Guru bertindak, siswa hanya membayangkan bagaimana bertindak sesuai dengan tindakan guru; (8) Guru menentukan apa yang diajarkan, siswa menyesuaikan diri; (9) Guru mengacaukan otoritas ilmu pengetahuan dengan otoritas profesional, yang bertentangan dengan kebebasan siswa; dan (10) Guru adalah subjek dalam proses belajar, sedangkan siswa hanya objek. Oleh karena itu, ketika dosen menjadi pusat perhatian, wajar jika siswa kemudian mengidentifikasi diri mereka dengan guru sebagai prototipe manusia ideal yang harus ditiru dan dicontoh dalam segala hal. Freire menyebut pendidikan semacam ini menciptakan "nekrofilia" ketimbang "biofilia." Implikasinya adalah bahwa pada akhirnya siswa akan menjadi cerminan guru mereka, melahirkan generasi baru penindas. Jika mereka kemudian menjadi guru atau pendidik, maka siklus penindasan akan berulang dalam dunia pendidikan.

Dengan demikian, sistem pendidikan justru berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan status quo, bukan sebagai kekuatan yang mendorong perubahan. Bagi Freire, sistem pendidikan seharusnya menjadi kekuatan yang menyadarkan dan membebaskan umat manusia. Namun, sistem pendidikan saat ini tampaknya telah menjadikan mahasiswa sebagai individu yang terasing dan terputus dari realitas diri mereka serta lingkungan sekitar. Hal ini terjadi karena mereka telah dididik untuk menjadi seperti orang lain, bukan untuk menjadi diri mereka sendiri. Pendidikan gaya bank menciptakan hubungan yang dapat menimbulkan tekanan bagi mahasiswa, baik melalui kata-kata maupun tindakan, termasuk pemberian hukuman yang berlebihan. Kondisi ini mengakibatkan hilangnya pola interaksi dialogis dan partisipatif dalam proses belajar mengajar. Sayangnya, pola hubungan ini masih sering

diterapkan di berbagai lembaga pendidikan, termasuk di sekolah. Sebaliknya, pola hubungan yang seharusnya diterapkan di kampus adalah hubungan yang tidak didasarkan pada struktur formal, tetapi berdasarkan kemitraan seperti yang diungkapkan oleh Freire. Dalam konteks ini, dosen seharusnya berperan sebagai sahabat yang memfasilitasi mahasiswa dalam proses pendidikan (Karim & Bahari, 2024). Fungsi pendidik di sini adalah sebagai penggerak, fasilitator, dan pelayan yang membantu pengembangan potensi dan kreativitas mahasiswa secara optimal. Suasana belajar yang diharapkan adalah menciptakan kelas yang fleksibel dan bebas dari intimidasi, karena lingkungan seperti itu tidak akan mendukung dinamika dan kreativitas. Kreativitas dapat berkembang ketika siswa merasa aman dan percaya diri, serta ketika guru memberikan dukungan dan kepercayaan kepada mereka.

Siswa adalah elemen krusial dalam pendidikan, karena tanpa mereka, proses pembelajaran di kelas tidak mungkin berlangsung. Menurut Maslow, pendidikan seharusnya memberikan kebebasan kepada siswa untuk membuat pilihan, tetapi hal ini perlu diimbangi dengan pengajaran tentang sikap yang tepat. siswa seharusnya diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi dan kreativitas yang merupakan bagian dari kodrat mereka. Dengan aktif berperan dan berpikir sebagai pelaku, mahasiswa dapat terlibat langsung dalam isu-isu nyata dalam suasana yang dialogis. Pembebasan hanya dapat tercapai jika mahasiswa benar-benar menyadari realitas diri dan lingkungannya. Tanpa kesadaran ini, mereka tidak akan mampu mengenali kebutuhan, mengungkapkan keinginan, atau memahami apa yang ingin dicapai. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk menyadari bahwa kemampuan memahami realitas tersebut adalah bagian dari kodrat kemanusiaan mereka dan bahwa pemahaman itu penting dan mungkin untuk dicapai (Sopian, 2021). Di sekolah berbasis masyarakat, kebebasan ini ditegaskan dengan menempatkan mahasiswa sebagai aktor yang otonom. Dengan kata lain, tidak ada kewajiban untuk mengadaptasi budaya atau peradaban dominan menjadi bentuk yang terpaksa (Sujarwo et al., 2017).

Setiap proses penterjemahan budaya mengandung agenda tertentu yang mengharuskan adanya kesamaan dengan budaya yang ditiru, dan hal ini sulit dicapai jika mahasiswa sudah memiliki kesadaran budaya yang berbeda. Selain itu, penterjemahan seringkali dianggap kurang adil bagi budaya asli. Konsep pendidikan ini sangat menghargai keberadaan siswa, menempatkan mereka sebagai subjek yang paling berperan dalam pendidikan. siswa diberikan kesempatan dan waktu yang luas untuk berimajinasi, mengekspresikan diri, menjelajahi, dan mengenali potensi mereka. Mereka terus didorong untuk mengembangkan bakatnya, termasuk dalam menggali nilai-nilai moral dan universal dalam kehidupan. Model pengajaran yang menyenangkan. Model ini merupakan pengembangan dari pendidikan tradisional yang lebih fokus pada tanggung jawab individu dalam proses pembelajaran. Menurut model ini, pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pribadi, tetapi juga tanggung jawab bersama melalui interaksi dalam kelompok. Metode kolaboratif yang melibatkan guru dan siswa menjadi ciri khas dari setiap pendekatan yang digunakan, sehingga proses pendidikan berlangsung dengan sinergi dan kesenangan. Dalam proses ini, dosen menyajikan materi untuk dipertimbangkan oleh mahasiswa, sementara pertimbangan dosen juga diuji kembali melalui masukan dari mahasiswa, dan begitu pula sebaliknya. Hubungan antara keduanya bersifat subjek-subjek, bukan subjek-obyek. Obyek yang mereka bahas adalah realitas, yang menciptakan suasana dialogis untuk saling memahami suatu obyek secara lebih mendalam.

## **5. Kesimpulan**

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang berkualitas tidak selalu harus mahal. Dengan adanya pendidikan yang berkualitas namun terjangkau, kampus dapat menyampaikan pesan ganda bahwa kualitas tidak selalu berbanding lurus dengan biaya. Selama ini, masyarakat cenderung menganggap bahwa pendidikan berkualitas selalu identik dengan biaya yang tinggi, di mana semakin baik kualitasnya, semakin besar biaya yang harus

dibayar. Pandangan ini perlu diubah. Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep pendidikan berbasis masyarakat dapat menjadi alternatif untuk pendidikan tinggi dalam memberdayakan masyarakat lokal. Saatnya untuk memanfaatkan, mengolah, dan memberdayakan kaidah-kaidah lokal melalui sistem pendidikan.

## 6. Daftar Pustaka

- Coleman, A. James. (1969). *Education and the Political Development*, Princeton, New Jersey. Danim, Sudarman. (2012). *Menajemen Kampus*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Faqih, Mansour dkk. (2007). *Pendidikan Populer Membangun Kesadaran Kritis*, Yogyakarta: Insist. Fiere, Paulo. (1985). *Pendidikan Kaum Tertindas (Pedagogy of Opressed)*, Penguin Books, 1978; edisi Indonesia diterbitkan oleh LP3ES.
- Fiere, Paulo. (1977). *Gerakan Kebudayaan untuk Kemerdekaan (Cultural Action for Freedom)*, Penguin Books.
- Goble, G. Frank. (1987). *Mazhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow*, Yogyakarta: Kanisius.
- Mastuhu. (20014). *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*, Yogyakarta: Safaria Insania Press.
- Zein, Muhammad. (2001), *Asas dan Pengembangan Kurikulum*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset. Zubaedi. (2006). *Pendidikan Berbasis Masyarakat; Upaya Menawarkan Solusi Terhadap Berbagai Problem Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Surya, Mohammad. (2009). *Psikologi Pendidikan*
- Hardiyanti, D. (2018). *Pengaruh pendidikan kesehatan berbasis komunitas terhadap pengetahuan, sikap dan praktik pemeriksaan payudara sendiri (sadari) pada perempuan di wilayah ....* repository.unair.ac.id. <https://repository.unair.ac.id/77134>
- Karim, A., & Bahari, Y. (2024). Model pendidikan berbasis komunitas. *Tumoutou Social Science Journal*. <http://kurniajurnal.com/index.php/tssj/article/view/173>
- Sopian, A. (2021). Model Pendidikan Karakter Di Masyarakat. *Al-Hasanah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*. <https://jurnal.staip.ac.id/index.php/hasanah/article/view/34>
- Sujarwo, S., Trisanti, T., & Santi, F. U. (2017). Pengembangan model pemberdayaan perempuan desa wisata melalui pendidikan berbasis komunitas. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpip/article/view/16798>